

PERAN MASYARAKAT DALAM MEMBENTUK LEARNING SOCIETY

*Kharisul Wathoni**

Abstract: *A discussion of the learning society has been issued by Torsten Husen in 1971. Learning society is the empowerment of communities and families in education. Within this time, the role of community and family in formal educational institutions has still lack of attention. Since the existence of school is in the midst of the society, certainly it should be an integral part of the surrounding community and it must not be moving around in the void of social life. Learning society is an effort to increase public participation in the management of learning resources provided in the community, hence this system may not be separated or remain an integral part of society as a whole. Through the efforts of this community empowerment, educational institutions plays an important role as the core of the learning society that can result in graduates who are qualified, capable, functional, and integrated with the community.*

ملخص: ولقد قام تورستين هوسين بالتعريف عن المجتمع المتعلم سنة ١٩٧١ م. والمجتمع المتعلم هو تقوية المجتمع والأسرة في التربية. إلى الآن، لم يكن هناك اهتمام كاف بدور المجتمع والأسرة في التربية الرسمية (المدارس). لكون المدارس في وسط المجتمع، لا بد هي أن تكون جزءا لا يتجزء من المجتمع، ولا تخرج عن اطار الحياة الاجتماعية. المجتمع المتعلم هو المحاولة لترقية مشاركة المجتمع في إدارة مصادر التعلم الموجودة في المجتمع واستفادتها، حتى لا يكون نظام التربية منفصلا أو هو ثابت في كونه جزءا لا يتجزء من المجتمع. بمحاولات التقوية و الترقية هذه، أصبحت المؤسسات التربوية مركزا للمجتمع المتعلم حتي خرجت الخريجين الجيدين و ذوى الكفايات الوظيفية المتحدين بالمجتمع.

Keyword: *masyarakat, learning society, pemberdayaan.*

* P3M STAIN Ponorogo Jalan Pramuka No. 156 Ponorogo

PENDAHULUAN

Keprihatinan bangsa yang tengah dilanda krisis dalam berbagai aspek kehidupan –dan mulai merangkak naik– membuat peran pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah, dipertanyakan. Dengan melihat kondisi riil yang ada, seperti maraknya tawuran pelajar, merebaknya narkoba, dan beberapa perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan budaya, seperti pergaulan bebas, membuat peran pendidikan di sekolahlah yang bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan yang menyelimuti generasi penerus bangsa pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Pendidikan sering pula dijadikan sebagai kambing hitam terhadap ketidakberhasilan -untuk tidak dikatakan kegagalan- dalam membentuk moral bangsa.

Di samping itu setidaknya ada enam faktor menjadi titik lemah yang kemudian menjadikan hancurnya sistem pendidikan¹. Enam faktor tersebut (1) sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik, (2) sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat (3) sistem birokrasi yang kaku dan tidak jarang sebagai kendaraan politik penguasa (4) terbelenggunya guru dan dijadikannya guru sebagai alat birokrasi (5) pendidikan yang ada tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun hanya lebih pada sisi kognitif peserta didik dan (6) anak tidak pernah dididik atau dibiasakan untuk kreatif dan inovatif serta berorientasi pada keinginan untuk tahu.

Walaupun demikian masyarakat secara umum masih menaruh harapan terhadap peran pendidikan, utamanya sekolah.. Sebab persepsi masyarakat terhadap sekolah mewakili kondisi yang ada dalam masyarakat atau negara. Kenyataan ini, misalnya, telah pula mendapatkan perhatian para filosof sejak zaman Plato dan Aristoteles. Sebagaimana diungkapkan bahwa *"as is the state, so is the school"* (sebagaimana negara, seperti itulah sekolah), atau *"what you want in the state, you must put into school"* (apa yang anda inginkan dalam negara, harus ada masukan dalam sekolah).²

Apabila tesis seperti ini yang dijadikan sebagai pijakan dalam melihat fenomena yang ada dalam masyarakat, maka apabila kondisi masyarakat yang ada (baca: negara) dinyatakan tidak berhasil –untuk tidak dikatakan gagal– dalam mengantarkan masyarakat Indonesia mencapai tujuan yang dicanangkan, maka itu diakibatkan oleh pendidikan yang jelek. Sebaliknya, apabila kondisi masyarakat yang ada dinilai baik, maka pendidikan dapat dinyatakan berhasil

¹ A. Qodry A. Aziziy, *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), 8-12.

² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), 61.

menghampiri tujuan yang telah ditetapkan. Namun, apakah dengan mudah bisa dinilai demikian?. Wacana ini memberikan makna, bahwa diantara institusi yang mengambil peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan tidak hanya didominasi oleh sistem sekolah, tapi juga peran keluarga dan masyarakat yang mengelilinginya.

Berangkat dari sini, maka perlu diperhatikan lingkungan di luar sekolah, baik secara formal maupun non formal, bahkan informal sekaligus. Pada gilirannya harus diciptakan lingkungan yang kondusif, yang mampu mengembangkan potensi masyarakat guna mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati bersama. Permasalahan-permasalahan inilah yang dicoba dibahas dalam tulisan berikut ini.

MENUMBUHKAN LEARNING SOCIETY DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Krisis multidimensional yang melanda negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, seharusnya membuka mata signikansi mutu sumber daya manusia, dan dengan sendirinya juga mutu pendidikan yang menghasilkan SDM bermutu tersebut. Kalau ditelaah secara mendalam, krisis yang terjadi selama ini memang banyak faktor yang mempengaruhinya, tetapi penyebab utama adalah sumber daya manusia yang kurang bermutu.³ Padahal pada saat yang sama kualitas SDM adalah faktor vital dalam pembentukan sebuah masyarakat yang beradab.

Kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat diilhami oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan di dalamnya.⁴ Tema *civil society*, atau diterjemahkan dalam istilah Indonesia dengan masyarakat madani dewasa ini semakin menjadi isu sentral yang banyak diperbincangkan. Bahkan sudah dilakukan upaya-upaya sosialisasi di berbagai forum dan kesempatan. Seiring dengan sosialisasi tersebut, penting pula disosialisasikan *learning society* (masyarakat belajar), istilah ini biasa juga disebut dengan *educational society* (dalam pembahasan selanjutnya, digunakan istilah *learning society*. pen.). *Learning society* secara praktek sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia –meski belum secara maksimal- namun secara konsep masih meraba-raba. Artinya, bila *civil society* telah mulai diperkenalkan dan disosialisasikan, maka untuk *learning society*

³ J. Riberu, "Revolusi di Dunia Pendidikan Indonesia", *Suara Pembaruan Daily*, 22/10/2005, <http://www.suarapembaruan.com/News/2004/05/14/Editor/edit01.htm>. Diakses 05 Mei 2011.

⁴ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 130.

belum ditemukan konsep yang matang dan *fixed*, sehingga istilah *learning society* belum populer didengungkan apalagi dimasyarakatkan.

Di sisi lain bahwa paradigma *learning* juga jelas terlihat dalam empat visi pendidikan menuju abad 21 versi UNESCO. Keempat visi pendidikan versi UNESCO ini sangat jelas berdasarkan pada paradigma *learning* dan tidak lagi pada *teaching*. Pertama, *learning to think* (belajar berpikir). Ini berarti pendidikan berorientasi pada pengetahuan logis dan rasional sehingga learner berarti menyatakan pendapat dan bersikap kritis serta memiliki semangat membaca yang tinggi. Kedua, *Learning to do* (belajar berbuat/hidup). Aspek yang ingin dicapai dalam visi ini adalah ketrampilan seirang anak didik dalam menyelesaikan problem keseharian. Dengan kata lain pendidikan diarahkan pada *how to solve the problem*. Ketiga *learning to live together* (belajar hidup bersama). Di sini pendidikan diarahkan pada pembentukan seorang anak didik yang berkesadaran bahwa kita ini hidup dalam sebuah dunia global bersama banyak manusia dari berbagai bahasa dengan latar belakang etnik, agama dan budaya. Keempat, *learning to be* (belajar menjadi diri sendiri). Visi terakhir ini menjadi sangat penting mengingat masyarakat modern saat ini tengah dilanda krisis kepribadian. Oleh karena itu pendidikan lebih diarahkan kepada bagaimana seorang peserta didik bias tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang mandiri, memiliki harga diri dan tidak sekedar memiliki having (materi-materi dan jabatan-jabatan politis).⁵

Pembahasan tentang *learning society* pada tahun 1971 telah diperkenalkan oleh Torsten Husen.⁶ Dalam batasan ini, yang dimaksud dengan *learning society* adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam bidang pendidikan. Selama ini peran lembaga pendidikan formal, dalam arti sekolah, yang baru mendapatkan perhatian. Sementara pendidikan non formal dan informal di Indonesia belum mendapatkan perhatian, andai mendapatkan perhatian hanya dalam porsi yang terbatas. Berkaitan dengan masalah ini, Torsten Husen menekankan adanya suatu kenyataan bahwa sekolah itu adalah dan haruslah merupakan bagian integral dari masyarakat di sekitarnya, dan sama sekali tidak boleh bergerak di dalam kehampaan kehidupan sosial.⁷

Pemahaman akan dunia pendidikan yang berfokus pada pendidikan formal saja tidaklah tepat, sebab konsep pendidikan (mendidik) yang ada diartikan secara luas. Hal ini dipahami untuk menyebut semua upaya untuk mengembangkan tiga hal, yaitu: pandangan hidup dan keterampilan hidup

⁵ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 25-26.

⁶ Torsten Husen, *Masyarakat Belajar*, terj. Surono Hargsewoyo (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 4.

⁷ *Ibid.*, 5.

diri seseorang atau sekelompok orang. Dengan kata lain, untuk menyebutkan peristiwa yang dampaknya ialah berkembangnya pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup diri seseorang atau sekelompok orang. Kalau suatu pendidikan sejak awal dirancang untuk mengembangkan ketiga hal tersebut, maka hal ini disebut sebagai pendidikan formal dan pendidikan non formal. Sebaliknya, apabila suatu tindakan yang sebenarnya tidak dirancang untuk mengembangkan ketiga hal tersebut, melainkan berdampak demikian, maka peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai pendidikan formal dan non formal selalu berupa upaya atau ikhtiar, sedangkan pendidikan informal selalu berupa peristiwa.

Pemahaman terhadap ketiga jenis pendidikan tersebut ditengahkan untuk memberikan pengertian baru terhadap peran pendidikan formal dan non formal. Dalam pengertian baru ini, maka kegiatan pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, akan tetapi juga di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pada gilirannya nanti tidak hanya pendidikan formal dalam arti sempit, sekolah, yang mendapat perhatian, akan tetapi juga pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan masyarakat (luar sekolah).

Pemahaman yang sekarang berkembang adalah menekankan pendidikan formal pada lingkungan sekolah, sehingga sekolah mendapat perhatian yang cukup besar. Sebagai konsekuensinya, apabila terjadi suatu ketidakselarasan atau penyimpangan pendidikan yang berlangsung dengan tujuan yang ditetapkan, maka sekolah akan mendapatkan sorotan yang paling tajam. Sementara pendidikan di luar sekolah dan pendidikan keluarga kurang mendapatkan perhatian, atau bahkan cenderung terabaikan. Inilah yang kemudian membuat situasi pendidikan terlihat pincang, sebab setiap pertumbuhan setiap manusia atau setiap masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pengalaman pendidikan formal. Pengaruh-pengaruh yang datang dari pengalaman-pengalaman pendidikan non formal dan informal sungguh tidak kalah penting. Dari sini dapat dilihat arti penting pendidikan dalam lingkungan di luar sekolah (baca: masyarakat) dan pendidikan di lingkungan keluarga. Untuk itu dibutuhkan kondisi yang mendukung terciptanya suatu masyarakat dan bukan hanya kemampuan transfer ilmu, akan tetapi juga transinternalisasi nilai-nilai, sehingga akan membentuk watak bangsa yang tidak hanya cerdas, tapi juga bermoral.

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MELALUI LEARNING SOCIETY

Dalam perjalanan selanjutnya hubungan antara pendidikan dengan penguasa begitu erat. Hal ini dapat dilacak dari data-data sejarah berdirinya madrasah.

Banyak pendirian madrasah di Timur Tengah yang disponsori oleh penguasa, seperti madrasah Nidzamiyyah di Baghdad. Pendirian madrasah tersebut untuk menunjang kepentingan politik tertentu dari penguasa muslim, di antaranya untuk menciptakan dan memperkokohkan citra penguasa sebagai orang-orang yang mempunyai kesalehan, minat dan kepedulian kepada kepentingan umat, dan yang lebih penting gilirannya akan memperkuat legitimasi penguasa *vis-a-vis* rakyat mereka.⁸

Tidak bisa dinafikan bahwa peran masyarakat muslim dalam pendidikan sangat penting dan terlihat dominan, utamanya bila dikaitkan dengan masyarakat belajar. Demikian juga dengan yang terjadi di Indonesia, sepanjang sejarah pendidikan Islam di kawasan ini, masyarakat muslim mengambil posisi terdepan dalam pendirian, pengembangan dan pemberdayaan pendidikan keagamaan.⁹ Hal ini dapat dilihat dari pendirian lembaga pendidikan, seperti pesantren, madrasah dan lembaga pendidikan lainnya.

Dalam perjalanan selanjutnya, dalam perannya terhadap pendidikan terdapat dua kecenderungan dalam masyarakat muslim. *Pertama*, kecenderungan untuk menegerikan sekolah-sekolah swasta yang telah didirikan dan dikelolanya, khususnya sejak dekade 1970, dan mendapatkan momentumnya lagi pada dasawarsa 1980. *Kedua*, kecenderungan untuk membangun perguruan Islam yang berkualitas (*quality education*). Peran serta masyarakat muslim dalam pendidikan dapat dilihat dari data-data madrasah swasta –yang lebih mengandalkan dana dari partisipasi masyarakat- dalam catatan berikutnya: 97,6% dari jumlah total MI, 24.372 adalah swasta, 92% dari jumlah MTs, 8.081 adalah swasta, dan 88% dari jumlah MA, 2.923 berstatus swasta.

Permasalahan berikut yang patut disuguhkan dan apakah cukup dengan peran sebagai pendiri, penyumbang dana (donatur), dan pengelola lembaga pendidikan, masyarakat muslim telah melaksanakan learning society? Pada hakekatnya ada beberapa harapan yang ingin dicapai dari *learning society*, khususnya bila dikaitkan dengan *civil society* tersebut, yaitu: (1). Terciptanya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tatanan masyarakat agamis yang bersifat dinamis karena memiliki perspektif moral. Perspektif moral dan harapan-harapan itulah yang merikat pluralisme dan kebhinekaan kepentingan; (2). Terciptanya masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat; (3). Masyarakat yang mengakui adanya hak-hak asasi manusia; (4). Masyarakat yang tertib dan sadar hukum, budaya malu yang apabila melanggar dan kemasyarakatan; (5).

⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*, 62.

⁹ *Ibid.*, 149.

Masyarakat yang percaya pada diri sendiri, memiliki kemandirian dan kreatif terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, masyarakat memiliki orientasi yang kuat pada penguasaan ilmu dan teknologi.

Kemajuan ini akan ditandai dengan tatanan kehidupan yang dinamis, kompetitif, inovatif, memiliki batiniyyah (*inner dynamics*) yang kuat untuk meraih kemajuan-kemajuan demi kepentingan bangsa, berwawasan luas, berorientasi jauh ke depan dan tidak hanya sebagai pemakai teknologi atau sasaran pemasaran bahan-bahan jadi dari negara lain, melainkan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya suatu masyarakat Indonesia yang maju dalam peradaban ilmu dan teknologi dimasa mendatang; (6). Sebagai bagian dari masyarakat global, yang memiliki semangat yang kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan yang universal; (7). Terwujudnya tatanan masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam tatanan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai masyarakat tersebut antara lain: bersilatullah, persaudaraan (*ukhuwah*), persamaan, adil, baik sangka, renda hati (*tawadhu'*), tepat janji, lapang dada, dapat dipercaya, harga diri, hemat, dermawan, dan sebagainya, (8). Mewujudkan masyarakat belajar yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Masyarakat belajar ini menempatkan pendidikan sebagai suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat. Penyelenggaraan pendidikan tidak lagi terikat oleh dimensi ruang dan kelembagaan. Kegiatan pendidikan dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu alternatif menuju terwujudnya *learning society*.¹⁰

Disadari bahwa perbaikan atau reformasi dalam pendidikan merupakan bagian yang integral dari reformasi politik, ekonomi, hukum dan lain-lainnya, yang diharapkan terjadi di masyarakat. Apabila dalam dunia politik, diharapkan terwujudnya demokrasi, maka dalam pendidikan harus pula mengajarkan demokrasi kepada peserta didik. Penanaman rasa demokrasi antara lain dengan kegiatan yang membentuk toleransi terhadap perbedaan pendapat, latihan untuk mengembangkan kemampuan mengeluarkan pendapat secara jelas dan sopan, serta latihan-latihan untuk membentuk kemampuan mengambil keputusan bersama, mengetahui masalah-masalah yang menyentuh kepentingan bersama. Dan dalam konteks lebih luas demokratisasi pendidikan meniscayakan bahwa dunia pendidikan dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat di

¹⁰ Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, *Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: Sekretariat Tim Madani, 1999), 199.

Indonesia menunjuk pada peran serta masyarakat dalam pendidikan yang salah satunya merupakan pendidikan luar sekolah yang didirikan oleh organisasi akar rumput (*grassroot organization*) seperti LSM dan pesantren.¹¹

Dalam bidang ekonomi, diharapkan bebas dari KKN, maka dalam pendidikan harus mendidik peserta didik untuk menjauhi segenap praktek hidup curang, mengerjakan untuk mengetahui ekonomis dari segenap pengetahuan serta keterampilan yang mereka kuasai, membiasakan peserta didik untuk bersikap terbuka, bersedia dikontrol dalam menjalankan tugasnya. Reformasi dalam bidang hukum, adalah penegakan keadilan dan menjunjung tinggi supermasi hukum. Dalam dunia pendidikan haruslah diajarkan ketaatan terhadap norma. Sementara yang berkembang saat ini ketaatan pada hukum berarti taat pada perorangan atau lembaga yang dipandang mewakili hukum. Ketaatan seperti inilah yang harus direformasi, kepatuhan kepada hukum itu sendiri sebagai norma. Dengan demikian akan merubah orientasi yang menekankan intelektualitas semata-mata ke orientasi yang menekankan orientasi intelektual dan kepekaan normatif, dan religius sekaligus.

PENDIDIKAN KELUARGA SEBAGAI BAROMETER TERWUJUDNYA LEARNING SOCIETY

Usaha yang dapat dilakukan guna mewujudkan masyarakat belajar adalah dengan memberdayakan keluarga agar menjadi keluarga yang gemar belajar. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat sangat menentukan karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Pengaruh keluarga dalam hal ini adalah mengarahkan proses tumbuh kembang generasi muda dalam masyarakat. Apakah dalam keluarga tersebut mampu membentuk anak-anak menjadi anak yang gandrung belajar? Keberanian untuk mencoba dan mengulangi segala sesuatu sampai berhasil, berpikir kritis, inovatif, dan karakter lainnya yang diperlukan nanti.

Anak lahir dalam keadaan fitrah, artinya anak berpotensi tauhid dan berpotensi untuk berbuat baik. Tidak ada anak yang memiliki bakat jelek, apabila diberi kesempatan dan diberi peluang untuk mengembangkan potensinya dengan baik, maka ia akan menjadi baik. Kenakalan anak, misalnya, secara psikologis membutuhkan kreatifitas dan keberanian, yang keduanya bukan potensi bawaan sejak lahir, akan tetapi merupakan perolehan dari hasil belajar dan interaksi

¹¹ Dean Nielsen, "Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia", dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (ed.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adi Cita, 2001), 175.

dengan lingkungan. Oleh sebab itu, kenakalan anak munculnya sebagian besar berasal dari keluarga dan masyarakat. Sumber dari keluarga antara lain: rumah tangga yang tidak harmonis, orang tua yang acuh terhadap perkembangan anak, memanjakan anak secara berlebihan, mendidik anak secara keras dan otoriter, kebiasaan hidup yang tidak baik, ketidakmampuan orang tua untuk mengendalikan anak dari pengaruh luar yang merusak.¹²

Dalam memberdayakan pendidikan keluarga, relevan untuk ditampilkan beberapa fungsi keluarga, yaitu:

- a. Fungsi keagamaan
- b. Fungsi cinta kasih
- c. Fungsi reproduksi
- d. Fungsi ekonomi
- e. Fungsi pembudayaan
- f. Fungsi perlindungan
- g. Fungsi pendidikan dan sosial
- h. Fungsi pelestarian lingkungan.¹³

Di samping memberdayakan pendidikan keluarga, upaya mewujudkan *learning society* adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Permasalahan yang berkaitan dengan lemahnya peran masyarakat, antara lain dapat dilihat dari lemahnya kontrol sosial dan kontrol moral dalam masyarakat terhadap penyimpangan-penyimpangan, pergeseran tata nilai baik dan buruk dalam masyarakat, menurunnya tanggung jawab sosial. Ikut melengkapi menurunnya peran masyarakat ini adalah kemajuan media informasi dan komunikasi yang mampu membuka dinding-dinding kamar setiap rumah sampai ke pedesaan yang tidak dapat diimbangi dengan kesiapan mental anggota masyarakat.

Pertanyaan yang perlu dijawab dalam masalah ini adalah bagaimana menciptakan suatu masyarakat yang gemar belajar dan suka bekerja keras sekaligus bermoral. Di negara Eropa, dalam usahanya mewujudkan *learning society* dengan melalui lima periode. Diawali dengan diberlakukannya pendidikan formal tingkat dasar pada tahun 1815-1880. pada awal abad 20 dilaksanakannya pendidikan umum, yang diikuti oleh setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, atau golongan. Pelaksanaan pendidikan dapat diistilahkan dengan wajib belajar. Pertengahan abad 20, tahun 1950-1960, terjadi ledakan peserta didik jenjang pendidikan. Pada tahap selanjutnya, lahir konsep pendidikan

¹² H.M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 116.

¹³ Yaumil C.A, *Reformasi Pendidikan Sebagai Upaya Memaksimalkan Hasil Pendidikan*, (Jakarta: Intermasa, 1997), 126.

orang dewasa (*adult/permanent/recurrent education* atau dapat disebut sebagai *long life education*). Periode ini diakhiri dengan masuknya teknologi di dunia pendidikan.

Dari paparan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa *learning society* berkembang dengan cara bertahap. Pertama yang harus dilakukan adalah memberi peluang pada masyarakat untuk mengembangkan pendidikan. Selama ini, pendidikan memang telah menunjukkan perannya, akan tetapi tidak jarang peran tersebut tidak selaras dengan gerak pembangunan di sektor lainnya, sehingga terlihat pincang. Oleh karena itu, bergulirnya gagasan otonomi daerah, yang diikuti oleh otonomi pendidikan disambut gembira, dengan harapan peran masyarakat dalam pendidikan dapat berlangsung secara maksimal dan optimal. Pada bagian lain, dengan adanya otonomi pendidikan diharapkan akan meningkatkan tanggung jawab masyarakat terhadap keberlangsungan kehidupan, khususnya dalam mempersiapkan generasi mudanya, guna menyongsong masa depan dengan penuh senyum optimis.

PENUTUP

Gagasan tentang *learning society* ini, misalnya, diungkapkan pula oleh Azyumardi Azra, dengan istilah Universitas Rakyat. Diilhami oleh beberapa fenomena yang ada dalam kehidupan masyarakat, dilengkapi oleh beberapa pemikiran Ivan Illich, Freire, dan Everet Reimer, gagasan tersebut belum tersosialisasi sebagaimana gagasan masyarakat madani, padahal kedua *society* ini –*civil society* dan *learning society*– haruslah berjalan beriringan. Artinya, untuk mewujudkan masyarakat madani, *civil society* adalah dengan atau melalui *learning society*.

Kesadaran masyarakat akan makna pendidikan adalah kata kunci dalam mewujudkan *learning society*, dan itu telah dilakukan oleh pesantren, meskipun dengan beberapa catatan. Usaha dalam mewujudkan masyarakat belajar ini tidak terlepas dari *political will* pemerintah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam partisipasi dalam dunia pendidikan, termasuk di dalamnya keterlibatannya masyarakat dalam memutuskan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan.

Dalam *learning society* berusaha mewujudkan pendidikan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan pendekatan demikian diharapkan akan mempertebal rasa *self of belonging* terhadap keadaan atau kondisi yang ada dalam masyarakat dan negara, yang pada gilirannya nanti akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberlangsungan

kehidupan masyarakat yang mengelilinginya. Akhirnya, dengan *learning society* diharapkan terwujudnya masyarakat madani (*civil society*), sebagaimana yang akhir-akhir ini marak dibumikan di bumi Indonesia, sekaligus sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi masalah yang melanda negeri ini dan juga sebagai langkah partisipatif dalam menjawab problematika pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999.
- Aziziy, A. Qodry A. *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003
- C.A, Yaumil., *Reformasi Pendidikan Sebagai Upaya Memaksimalkan Hasil Pendidikan*, Jakarta: Intermasa, 1997.
- J. Riberu, "Revolusi di Dunia Pendidikan Indonesia", *Suara Pembaruan Daily*, 22/10/2005, <http://www.suarapembaruan.com/News/2004/05/14/Editor/edit01.htm>.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, JakartaL: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Munir, "Eksistensi dan Degradasi Lembaga Pendidikan Islam", dalam Toto Suharto et.al. (eds.), *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nasir, M. Ridwan. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nielsen, Dean., "Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia", dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (ed.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adi Cita, 2001.
- Nata, Abuddin, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia* Bogor: Kencana, 2003.
- Sidi, Indra Djati, *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta: Paramadina, 2001.

228 Kharisul Wathoni, Peran Masyarakat dalam Membentuk Learning Society

Torsten Husen, *Masyarakat Belajar*, terj. Surono Hargsewoyo, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, *Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: Sekretariat Tim Madani, 1999.

Thoha, H.M. Chabib., *Kapita Selekta Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005